

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35 (4): 216-224.
- Duadji, Noverman. 2013. Partisipasi Publik Dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 5 (3): 197-204.
- Fitoriani, Kingkin; Regina Yuliani. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sektor PUPR). *Jurnal Analisis Kebijakan*, 4 (2): 61-70.
- Fung, Archon. 2006. Varieties Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66 (s1): 66-75.
- Hamdani, Rizkiana Sidqiyatul. 2020. Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 4 (1): 43-62.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Kosasih, M. 2016. Pengetahuan Tentang Lingkungan Hidup, Kepedulian Lingkungan dan Etos Kerja Dengan Partisipasi Karyawan Dalam Mendukung Program Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) di PT Enggal Sukses Perkasa Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 17 (1): 42-61.
- Muadi, Sholih; Ismail MH; Ahmad Sofwani. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6 (2): 195-224.
- Muhiddin, Amir. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda). *Otoritas*, 3 (1): 1-9.
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Munadi, Muhammad. 2008. Community Participation in The Public Policy Making in Education Sector in Surakarta Municipality. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 12 (2): 268-284.

- Mustanir, Ahmad dan Partisan Abadi. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5 (2): 248-261.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pemerintah Sulawesi Selatan. 2019. Peraturan DPRD Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemerintah Sulawesi Selatan. 2022. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- Praptanugraha. 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum*, 3 (15): 459-473.
- Prasojo, Eko. 2003. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jakarta: PKSPSP FISIP UI.
- Rahma, Ida. 2019. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14 (1): 80-95.
- Rosana, Ellya. 2016. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Tapis*, 12 (1): 37-53.
- Samsir, Andi Novita; Gita Susanti. 2023. Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemerintah Lokal: Studi Kasus Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 9 (1): 63.

- Shi, Mengqi. 2019. Case Test of Citizen Participation in Complex Governance-Based on the Democracy Cube. *Journal of Social Sciences*, 7 (10): 255-260.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sururi, Ahmad. 2018. Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situtera Kecamatan Cikande Kabupaten Serang). *Jurnal Administrative Reform*, 6 (3): 110-121.
- Tetama, Androvaga Renandra; Suharno; Yaritza Nafa Tyola. 2022. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah. *Jurnal Widya Bhumi*, 2 (2): 136-151.
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Sad Dian. 2003. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan", dalam Indra J. Piliang, Deni Ramdani dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: *Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Ulum, Safrilul; Dewi, Suryani Amanatun. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 3 (1): 14-24.
- Wahyunengseh, Rutiana Dwi. 2018. Forum Konsultasi Publik : Aktivis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa. *Spirit Publik*, 12 (2): 32-42.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

**Sumber online:**

dprd.sulselprov.go.id diakses terakhir pada 23 Januari 2023 pukul 23.38 Wita.

# LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE

### A. BIODATA PRIBADI

Nama : Masyita Marsuki  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal lahir : Malino, 18 Januari 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Rajawali No. 5 Makassar  
No. HP : 0895702774303  
Email : masyitamarsuki99@gmail.com  
Nama orang tua

- Ayah : Marsuki
- Ibu : Salmiah Budu

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDIT Wihdatul Ummah
2. SMP : MTsN Model Makassar (sekarang MTsN 1 Kota Makassar)
3. SMA : MAN 2 Model Makassar (sekarang MAN 2 Kota Makassar)

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua PMR MAN 2 Model Makassar (2015-2016)
2. Duta Damai Sulawesi Selatan (2018)
3. Humas UKM Pencak Silat Panca Suci FISIP Unhas (2018-2019)
4. Sekretaris Umum IKA PMR MAN 2 Kota Makassar (2019-sekarang)
5. PSDA KSR PMI Unhas (2020)
6. Ketua Umum Humanis FISIP Unhas (2019-2020)
7. Koordinator DPO Humanis FISIP Unhas (2020-2021)
8. Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Pimpinan Komisariat IMM Ekonomi Sosial Politik Unhas (2020-2021)
9. Ketua Bidang Kader Pimpinan Cabang IMM Makassar Timur (2022)
10. Rektor Kampus Gagasan (sekarang)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024 Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 41619 /UN4.8.1/PT.01.04/2023 13 Juli 2023  
Hal : Permohonan Izin Melakukan  
Penelitian / Wawancara

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan  
c.q. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sulsel  
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

nama : Masyita Marsuki  
no. pokok : E011 17 1306  
departemen : Ilmu Administrasi  
prog.Studi : Administrasi Publik  
alamat : Jln. Rajawali No.5 Makassar

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Partisipasi Publik Dalam Formulasi Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan

Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si  
NIP. 196801011997022001

Tembusan :  
1. Dekan Fisip Unhas  
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **21264/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 4889/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MASYITA MARSUKI**  
Nomor Pokok : **E011171306**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PARTISIPASI PUBLIK DALAM FORMULASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DPRD  
PROVINSI SULAWESI SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Juli s/d 30 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

Nomor: 21264/S.01/PTSP/2023

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**  
**<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**

NOMOR REGISTRASI 20230714995401



Catatan :  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



 Dipindai dengan CamScanner





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 – 453646 – 453461 Fax. 453562  
M A K A S S A R 90232

Makassar, 20 Juli 2023

Nomor : 410/376 /Set. DPRD.  
Lamp :  
Perihal : **Jawaban Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. **Dekan FISIP**  
**Universitas Hasanuddin**

di-  
**Makassar**

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara nomor 4889/UN4.8.1/PT.01.04/2023, tanggal 13 Juli 2023 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa pada prinsipnya kami bersedia menerima mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MASYITA MARSUKI  
No. Pokok : E011171306  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul Usulan Skripsi : "Partisipasi Publik Dalam Formulasi Rancangan Perda Di Dprd Prov Sulsel"

Dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar kiranya Mahasiswa tersebut dapat mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan wajib mengikuti protokol kesehatan covid 19.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**SEKRETARIS DPRD PROV. SULSEL**

**Drs. N. HABIR, M. Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19661031 198709 1001

Tembusan Yth:

1. Para Kabag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;
2. Para Kasubbag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;
3. Pertinggal.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Urip Sumoharjo No. 59 Telp. 0411-453344, 453646, 453461, Fax 453562, MAKASSAR 90232

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 137-4 / SET. DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : **Drs. M. JABIR, M. Si**  
**Pangkat/Gol.** : **Pembina Utama Muda, IV/c**  
**Jabatan** : **Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.**  
**Unit Kerja** : **Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Instansi** : **Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : **Masyita Marsuki**  
**NIM** : **E011171306**  
**Program Studi** : **Ilmu Administrasi**  
**Perguruan Tinggi** : **Universitas Hasanuddin**  
**Judul Skripsi** : **"Partisipasi Publik Dalam Formulasi Rancangan Perda Di Dprd Prov. Sulsel"**

Telah melakukan Penelitian di Kantor Dprd Prov. Sulsel.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipersyaratkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Januari 2024

**SEKRETARIS DPRD PROV. SULSEL**



**Drs. M. JABIR, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**Nip : 19661031 198709 1001**

## Dokumentasi Penelitian

